PLURALISME HUKUM NEGARA

Aghi Miftahul Hikmi

Email : Adenaghi21@gmail.com

No Bp : 2010003600229

Universitas Ekasakti Padang

A.PENDAHULUAN

Kehidupan manusia memang tidak terlepas dari hukum. Hukum bukan hanya menjadi pedoman, tetapi tuntutan hidup untuk masyarakat. Masyarakat pun meyakini bahwa kehidupan mereka tidak akan terkontrol tanpa andil dari hukum di negara ini. Dapat dikatakan hukum sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Hukum negara merupakan sesuatu yang penting untuk membentuk masyarakat yang lebih baik lagi. Dengan hukum yang baik, maka masyarakat tersebut bisa memberikan kontribusi terhadap kehidupan pribadi, keluarga, dan sekitar, maupun negara supaya bisa menjadi lebih baik. Karena itu pengetahuan tentang hukum haruslah sudah mulai diterapkan sedari dini. Sayangnya di Indonesia, pengetahuan tentang hukum masih belum terlalu matang untuk Sebagian masyarakat. Tidak hanya dari segi hukum, tapi juga tentang moral dan juga etika serta kurangnya sikap saling mengingatkan di negeri ini.

Kepentingan hukum harus diutamakan daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Tujuannya agar tak terjadi kekisruhan yang berujung pada ketidakadilan dalam hidup bermasyarakat. Kejadian serupa seringkali terjadi di beberapa daerah dengan masalah yang cukup sepele. Persitegangan antara hukum rakyat dengan hukum negara telah terjadi sejak zaman pendudukan kolonial di Indonesia dan niscaya terjadi pada negara-negara yang terbentuk atas berbagai suku bangsa dengan keragaman budayanya. Persitegangan hukum yang berbeda tersebut tidak jarang berujung pada konflik horizontal maupun vertikal. Ketidakharmonisan hukum rakyat dan negara mengemuka sebagai akibat dari kebijakan pembangunan hukum nasional yang mentransplantasikan hukum yang 'asing' dengan berbagai cara kepada masyarakat yang sejatinya mempunyai hukumnya sendiri. Kata asing dalam hal ini dapat dimaknai dalam dua pengertian, di satu sisi 'asing' dapat bersumber dari hukum kaum penjajah yang diterapkan di daerah koloni, dan di sisi lain hukum yang 'asing' itu adalah hukum nasional yang menjadi produk dari unifikasi dan modernisasi hukum, yang mana dua hal tersebut secara langsung maupun tidak menyingkirkan keragaman hukum rakyat atau anasir sistem hukum yang ada di luar sistem hukum negara/nasional.

Salah satu contoh konflik hukum yang nyata dan sekaligus contoh yang berulang dikemukakan adalah konflik hukum adat dan hukum negara. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (UU Pokok Agraria) dengan jelas memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam penguasaan tanah dan SDA, tetapi masih ada regulasi lain yang menegaskan prinsip tersebut, UU Kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999) misalnya yang mengakui keberadaan hutan adat, akan tetapi UU tersebut menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara. Konflik sistem hukum tersebut tidak jarang berujung pada konflik horizontal maupun vertikal dan menggambarkan bahwa sesungguhnya terdapat gap atau kesenjangan antara pembentuk hukum (institusi negara) dengan pengemban hukum (masyarakat). Konflik demikian terkadang juga menjadi penyebab mandulnya hukum negara dalam pelaksanaannya. Hal ini seolah menegaskan bahwa munculnya penolakan terhadap hukum negara bukan sekedar persoalan keterbatasan

pemahaman atau ketidaksadaran hukum masyarakat, tetapi lebih dari itu adalah karena ketidaksediaan rakyat menaati hukum yang berbeda dengan keseharian mereka.

Beranjak dari kondisi tersebut, muncul pertanyaan apakah yang dapat dilakukan untuk mendamaikan kedua hukum tersebut atau setidaknya mempersempit kesenjangan diantara kedua hukum itu. Menjawab pertanyaan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan bahkan sejak masa kolonial, secara substansi hukum negara mengakui keragaman hukum yang hidup dalam keseharian masyarakat, dan secara strategi pembangunan hukum, negara harus menitikberatkan pengenalan hukum pada masyarakat ketimbang memaksakan keberlakuan hukum negara tersebut. Dalam konteks ini lah, pendekatan pluralisme hukum dalam pembentukan hukum nasional dan pengenalan hukum menjadi amat penting.

B. PEMBAHASAN

Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Pluralisme hukum harus diakui sebagai sebuah realitas masyarakat.

Terdapat dua jenis pluralisme hukum. Yang pertama adalah "pluralisme hukum negara", yaitu ketika dua sistem norma berlaku sebagai hukum negara. Contohnya adalah hukum adat dan hukum tertulis yang berlaku sebagai hukum negara di Afrika pada masa penjajahan. Sementara itu, jenis pluralisme hukum yang kedua adalah *deep legal pluralism*, yaitu ketika terdapat tatanan norma di luar hukum negara yang berlaku di masyarakat.

Pluralisme sistem hukum adalah Berlakunya banyak sistem hukum bagi semua golongan dalam satu wilayah, khususnya di Indonesia yaitu secara bersamaan berlaku beberapa sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat.

1. Konseptualisasi Pluralisme Hukum Negara

Isu maupun kajian seputar pluralisme hukum bukan isu baru ataupun ranah studi baru di Indonesia. Secara sederhana, pluralisme hukum hadir sebagai kritikan terhadap sentralisme dan positivisme dalam penerapan hukum kepada rakyat. Terdapat beberapa jalan dalam memahami pluralisme hukum. Pertama, pluralisme hukum menjelaskan relasi berbagai sistem hukum yang bekerja dalam masyarakat. Kedua, pluralisme hukum memetakan berbagai hukum yang ada dalam suatu bidang sosial. Ketiga, menjelaskan relasi, adaptasi, dan kompetisi antar sistem hukum. Ketiga, pluralisme hukum memperlihatkan pilihan warga memanfaatkan hukum tertentu ketika berkonflik. Dari tiga cara pandang tersebut dan masih banyak cara pandang lainnya, secara ringkas kita bisa katakan bahwa pluralisme hukum adalah kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Senada dengan itu, meminjam ungkapan dari Brian Z. Tamanaha, *legal pluralism is everywhere*. Ungkapan ini menegaskan bahwasanya di area sosial keragaman sistem normatif adalah keniscayaan. Namun, hal menarik tentang pluralisme hukum bukan hanya terletak pada keanekaragaman sistem normatif tersebut, melainkan pada fakta dan potensi untuk saling bersitegang hingga menciptakan ketidakpastian. Ketidakpastian ini menjadi salah satu titik lemah yang "diserang" dari pluralisme hukum, walaupun hal ini tidak sepenuhnya benar karena permasalahan pokok dari potensi konflik tersebut adalah adanya relasi yang asimetris dari sistem normatif tersebut.

Berjalanan dengan itu, John Griffiths mengemukakan konsep pluralisme hukum yang lemah (*weak pluralism*) dan pluralisme hukum yang kuat (*strong pluralism*). Pluralisme hukum disebut sebagai pluralisme hukum yang lemah ketika negara mengakui kehadiran anasir sistem hukum lain di luar hukum negara, tetapi sistem-sistem hukum non negara tersebut tunduk keberlakuannya di bawah hukum negara. Sementara itu, pluralisme hukum yang kuat hadir ketika negara mengakui keberadaan hukum non negara dan sistem hukum tersebut mempunyai kapasitas keberlakuan yang sama dengan hukum negara.

Pandangan Tamanaha dan Griffiths di atas pada akhirnya membawa kita pada ulasan tentang kelemahan dan kritik terhadap pluralisme hukum. Ketika ketimpangan dominasi kekuasaan diantara eksponen berbagai sistem hukum tersebut tetap langgeng, maka pluralisme hukum bisa jadi sebatas mitos atau delusi, dan terciptanya ketidakpastian hukum bukan tidak mungkin terjadi apabila pluralisme hukum membuka ruang pengakuan bagi setiap sistem hukum lain di luar hukum negara tanpa adanya batasan yang jelas. Dua hal ini setidaknya memberikan 'peringatan' pada kita bahwa pluralisme hukum yang semula hadir untuk mengkritik juga tidak sepi dari kritikan. Pada bagian berikut ini akan dibahas ihwal kritik atas pluralisme hukum dan kaitannya dengan permasalahan yang ada pada konteks pembangunan sistem hukum di Indonesia.

Kritik dan Permasalahan pada Pluralisme Hukum dalam Konteks Negara

Sebagaimana pemaparan sebelumnya, pluralisme hukum boleh dikatakan menjadi jawaban terhadap kekurangan yang ditemui pada cara pandang sistem hukum nasional di Indonesia yang cenderung sentralistik. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung ide pluralisme hukum di dalamnya. Contoh klasik adalah UU Agraria yang secara jelas menyebut pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat dan tanah ulayat. Pada perkembangannya, tidak saja di tingkat nasional tetapi juga di tingkat daerah juga bermunculan peraturan daerah yang mencoba mengakui atau mengintegrasikan keberagaman hukum di tingkat lokal seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah dan otonomi khusus. Sebagai contoh, maraknya pembentukan perda syariah di daerah, *qanun* di Aceh, dan pembentukan lembaga-lembaga adat yang diakui sebagai media penyelesaian sengketa adat.

Selintas lalu, situasi tersebut dapat diapresiasi sebagai sebuah terobosan pembaruan hukum dan upaya untuk mengakomodasi keragaman normatif yang ada di masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya dijumpai pelbagai permasalahan yang membawa kita pada kondisi yang dilematis dan keadaan pluralisme hukum yang lemah sebagaimana pandangan Griffiths. Pasalnya, keberadaan hukum 'rakyat' atau hukum adat tersebut bergantung pada pengakuan hukum negara. Lebih jauh dari itu, apa yang disebut dengan hukum adat adalah konstruksi oleh hukum negara, dengan demikian hukum adat bukanlah hukum yang hidup dan dipercayai oleh masyarakat melainkan hukum 'adat' yang dirumuskan oleh hukum negara. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan keberadaan lembaga adat tersebut, dimana hasil dari penyelesaian lembaga adat tidak jarang dimentahkan oleh lembaga peradilan atau lembaga ini nyaris tidak bertaji dalam menyelesaikan sengketa adat di lingkungan masyarakat adat sebab lembaga adat tersebut tidak mempunyai kapasitas mengeksekusi keputusan layaknya institusi peradilan. Lain halnya dengan perda syariah, yang mana di beberapa daerah perda tersebut mengundang penolakan keras oleh masyarakat di daerah yang bersangkutan. Pasalnya, ketentuan dalam perda-perda demikian

bertolak belakang dengan ketentuan undang-undang yang secara hierarki harus selaras, bahkan pada titik tertentu perda tersebut dinilai bertentangan dengan HAM.

Berbagai kondisi di atas cukup menggambarkan kelemahan dan kritikan terhadap pluralisme hukum sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya yakni membuka peluang konflik norma yang akhirnya memunculkan ketidakpastian hukum yang bagaimana pun merupakan prinsip penting dalam penegakan hukum. Selain itu, kritikan sekaligus pertanyaan substansial tentang pluralisme hukum yang mengemuka dari gambaran permasalahan tersebut adalah apakah pluralisme hukum menyediakan solusi praktis bagi penyelesaian masalah hukum dalam masyarakat? yang lebih jauh lagi apakah pendekatan pluralisme hukum masih relevan bagi pembangunan hukum Indonesia ke depan yang khususnya dituangkan dalam produk legislasi? Jawaban dari pertanyaan tersebut akan menjadi pokok bahasan pada bagian di bawah ini.

Relevansi/Kegunaan Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum Negara ke Depan

Pluralisme hukum memang tidak seketika menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Akan tetapi, pluralisme hukum hadir untuk memberikan pemahaman yang baru kepada praktisi hukum, pembentuk hukum negara (para legislator) serta masyarakat secara luas bahwa disamping hukum negara terdapat sistem-sistem hukum lain yang lebih dulu ada di masyarakat dan sistem hukum tersebut berinteraksi dengan hukum negara dan bahkan berkompetisi satu sama lain. Disamping itu, pluralisme hukum memberikan penjelasan terhadap kenyataan adanya tertib sosial yang bukan bagian dari keteraturan hukum negara. Pandangan sentralistik berpendapat bahwa satu-satunya institusi yang berperan menciptakan keteraturan sosial adalah negara melalui hukum yang dibentuk dan ditetapkan oleh negara. Pada realitanya, banyak terdapat 'kekuatan lain' yang tidak berasal dari negara. Diantaranya, hukum adat, hukum agama, kebiasaan-kebiasaan, perjanjian-perjanjian perdagangan lintas bangsa dan sebagainya. Kekuatan-kekuatan tersebut sama-sama memiliki kemampuan mengatur tindakan-tindakan masyarakat yang terikat di dalamnya, bahkan terkadang anggota atau komunitas dalam masyarakat lebih memilih untuk mentaati aturan-aturan yang dibentuk oleh kelompoknya dibanding aturan hukum negara.

Jika demikian, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa pluralisme hukum masih atau tetap dibutuhkan di negara ini. Terkait dengan itu, pada tahun 2010 Learning Centre Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) menyelenggarakan survey di tiga kabupaten/kota guna mencari tahu kebutuhan masyarakat akan pluralisme hukum dalam substansi hukum. Survey ini melibatkan 212 responden yang terdiri dari kalangan mahasiswa, birokrat pemerintahan, penegak hukum, dosen, organisasi rakyat dan aktivis LSM. Dari hasil survey tersebut, 4 (empat) urusan hukum yang dipandang penting memuat unsur pluralisme hukum adalah: urusan perdata umum; adat; pidana, dan penguasaan tanah. Hasil survey tersebut tentunya bisa diperdebatkan lebih lanjut, tetapi setidaknya menunjukkan bahwa rakyat mempunyai pilihan sendiri terhadap sistem hukum yang mereka percayai dapat mengatur urusan kehidupannya dan menyelesaikan konflik diantara mereka. Hal ini seyogyanya menjadi bahan pertimbangan yang signifikan bagi Pemerintah dan Legislatur ketika merumuskan hukum nasional maupun strategi pembangunan hukum nasional. Disamping itu, juga bagi penegak hukum agar memahami bahwa masyarakat memiliki pilihan cara untuk mengakses keadilan dalam menyelesaikan sengketa diantara mereka.

2. Pluralisme Hukum Negara: Antara Hukum Adat dan Hukum Islam

Pluralisme hukum di Negara Indonesia mulai disadari sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Fakta masyarakat pribumi yang mempraktikkan beragam hukum, menuntut pemerintahan Hindia Belanda untuk memberlakukan hukum yang sama bagi semua masyarakat Pribumi. Isu mengenai kebijakan pemerintahan Hindia Belanda untuk memberlakukan satu hukum yang tepat bagi masyarakat pribumi, mendorong beberapa Ahli untuk mencari formulasi hukum yang tepat bagi masyarakat Pribumi. Dari sinilah muncul berbagai diskusi mengenai hukum Adat dan Islam, baik diskusi verbal maupun bentuk tulisan. Diskusi para ahli ini dipercaya berporos pada pertanyaan mengenai apakah Hukum Adat atau Hukum Islam yang harus diberlakukan bagi masyarakat Pribumi. Dalam diskusi ini muncul berbagai pendapat para ahli hukum, baik ahli hukum Belanda maupun Indonesia, diantara mereka ada yang memotret dengan kaca mata konflik (hukum Adat dan hukum Islam terus bertarung), dan tidak sedikit juga yang memandang dengan lensa fungsional (hukum Adat dan hukum Islam saling bergantung).

Hukum Adat Versus Hukum Islam (Pendekatan Konflik)

Hangatnya posisi Hukum Adat dan Hukum Islam pada masyarakat Nusantara menghasilkan perdebatan yang cukup menghibur dunia akademis di tanah air. Tidak sekedar itu yang bisa dirasakan, namun yang paling penting adalah mampu membuka diskusi-diskusi yang berkelanjutan bagi generasi-generasi bangsa ini. Ratno mengatakan kajian mengenai hukum adat dimulai sejak pemerintahan VOC (1602-1800) yang diawali oleh Marooned (1754-1836), Reffles (1781- 1826), Crawford (1783-1868), dan Muntinghe (1773-1827). Seiring dengan semakin derasnya isu-isu modernisasi hukum yang semakin kencang dihebuskan oleh pemerintahan Hindia Belanda, mendorong munculnya berbagai diskusi dan spekulasi para ahli hukum mengenai “hukum apa yang tepat untuk diberlakukan bagi masyarakat pribumi”, diskusi para ahli ini dipercaya berkisar pada dominasi antara hukum Adat dan hukum Islam.

Diskusi pertama diawali dengan teori *Receptie in Complexu* yang diperkenalkan oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg (1845-1927), Ia seorang ahli hukum Islam yang pernah tinggal di Indonesia pada tahun 1870-1887, Teori ini menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku sepenuhnya hukum Islam, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Ungkapan Van den Berg ini didasari oleh pernyataan yang mengatakan hukum Islam telah berlaku pada masyarakat asli Indonesia sejak 1883 yang diperkuat dengan adanya *Regeering Reglement*, dan *Compendium freijer* tahun 1706 tentang hukum perkawinan dan kewarisan Islam. Teori ini menghendaki bahwa bagi masyarakat pribumi yang beragama Islam diberlakukan hukum Islam. Teori ini ditawarkan oleh Van den Berg berdasarkan pengamatan personalnya terhadap masyarakat di beberapa kerajaan Islam Nusantara, dan hasil pengamatannya bahwa seluruh hukum Islam sudah ditermima secara menyeluruh oleh umat Islam. Sehingga, teori ini mengatakan hukum islam berlaku seutuhnya bagi umat islam, karena hukum adat sudah menyesuaikan diri dengan hukum Islam.¹¹ Sehingga, teori ini menghendaki bahwa bagi orang Islam berlaku sepenuhnya hukum Islam, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan, hal ini dikarenakan hukum Islam telah berlaku pada masyarakat asli Indonesia sejak 1883 yang diperkuat dengan adanya *Regeering Reglement*, dan hukum perkawinan dan kewarisan Islam dalam *Compendium freijer* tahun 1706.

Pendapat dari Van den Berg di atas mengenai dominasi hukum Islam dari pada hukum adat, ternyata mendapatkan keritikan dari seorang sarjana asal Belanda yang bernama C. Snouck Hurgronje (1857-1936). Ketika Hurgronje menetap dan mengamati perilaku masyarakat Nusantara, ternyata bukan hukum Islam yang lebih dominan, namun hukum adatlah yang lebih dominan dari hukum Islam. Sehingga Hurgronje berkesimpulan bahwa hukum Islam bisa diberlakukan jika sudah diterima oleh masyarakat hukum adat, pendapatnya ini kemudian dia jadikan sebagai teori, dan teori ini dia namakan sebagai teori Receptie yang diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936), kemudian dikembangkan oleh C. Van Vollenhoven dan Ter Haar di atas, bertujuan untuk mengkritisi atas teori Receptie in Complexu-nya Van den Berg. Snouck Hurgronje sendiri dikenal sebagai penasihat pemerintah Hindia Belanda tentang soal-soal Islam dan anak negeri tahun 1898. Ia pernah belajar ke Makkah sehingga berganti namanya menjadi Abdul Ghaffur (1884- 1885), Keahliannya dalam hukum Islam dan hukum adat terepleksi dalam karyanya De Atjehers dan De Gojoand. Inti dari teori Snouck ini bahwa bagi masyarakat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat, dan hukum Islam akan berlaku apabila norma-norma hukum Islam telah diterima atau diserap oleh masyarakat hukum adat.

Setelah kemerdekaan Indonesia, teori Receptie-nya Snouck ini ditelaah kembali kebenarannya oleh Hazairin. Hazairin menyimpulkan bahwa tidak benar Hukum Islam itu bergantung kepada hukum Adat, karena hukum Islam itu adalah mandiri. Sehubungan dengan ini, Hazairin memperkenalkan teori Receptie Exit, teori ini bertujuan untuk membantah teori Receptie Snouck di atas. Menurut Hazairin, Hukum Islam adalah hukum yang mandiri dan lepas dari pengaruh hukum lainnya. Berdasarkan pandangannya, Hazairin memiliki kesamaan pandangan dengan Van den Berg yang menginginkan hukum Islam diberlakukan sepenuhnya bagi masyarakat Islam (pribumi). Beberapa tahun kemudian, teori Hazairin ini dikembangkan oleh muridnya yang bernama Sayuti Thalib, dan menghasilkan teori Receptie a Contrario. Teori ini mengklaim bahwa teori Receptie yang diperkenalkan oleh Snouck merupakan atau sebagai teori Iblis. Inti dari teori Sayuti adalah bagi orang Islam berlaku hukum Islam; hukum Islam berlaku sesuai dengan cita hukum, cita moral dan batin umat Islam; dan hukum Adat berlaku jika sesuai dengan hukum Islam.

Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam (Pendekatan Fungsional)

Pada dasarnya teori fungsional budaya ini muncul dari metode penelitian yang menitik beratkan focus kajiannya terhadap proses-proses kebudayaan, dimana sifat ketergantungan antara satu unsur dengan unsur yang lain saling mempengaruhi dalam suatu budaya.

Kemudian aktifitas akademis ini diperkuat oleh Malinowski dalam kajiannya terhadap proses kebudayaan dalam masyarakat Trobriand. Ketika masyarakat Trobriand melakukan aktifitas ritual tertentu, dimana secara fungsional adalah untuk mengurangi kecemasan mereka terhadap hal-hal yang tidak dipahami dalam menjalani kehidupannya.

Sehingga, analisis fungsional membangun asumsi yang bertumpu pada analogi organism, dalam arti bahwa memahami system budaya sebagai organisme yang mana bagian-bagiannya tidak saja sebatas saling berhubungan antara satu sama lain, namun saling memelihara, menjaga stabilitas, dan melestarikan kehidupan unsur-unsur atau organism yang ada dalam kebudayaan itu. Dalam melestarikan stabilitas sistemnya, kebudayaan harus memiliki syarat-syarat fungsional yang berfungsi untuk menjaga eksistensinya, atau dalam bahasa Malinowski adalah kebutuhan biologis individual.

Dalam konteks kajian Adat dan Islam, salah satu tulisan yang menggunakan teori fungsional ini dalam melihat dialektika antara Islam dan budaya lokal adalah Noel James Coulson. Dalam tulisannya berjudul *Muslim Custom and Case Law*, Coulson berpendapat bahwa Islam dan budaya lokal berkolaborasi dalam memutuskan kasus hukum di beberapa kawasan yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Kolaborasi ini dicontohkan oleh Coulson seperti beberapa masyarakat yang mayoritas anggotanya adalah beragama Islam, diantaranya adalah Masyarakat Muslim Marocco, India, Tunisia, masyarakat Kabylie di Algeria, masyarakat Youruba di Nigeria, Yaman, dan masyarakat Jawa.

Di Indonesia, ada beberapa pakar hukum Islam dan hukum Adat mengkaji ulang mengenai desas-desus antara Hukum Adat dan Islam. Namun, kajian belakangan ini lebih condong melihat kedua budaya hukum itu dari sisi kompromitas atau harmonitas antara ketiga sistem hukum itu. Misalnya, Taufik Abdullah melihat bahwa masyarakat Minangkabau mempraktikkan hukum Adat dan hukum Islam secara bersamaan sehingga lebih membahasakannya sebagai intraksionis antara hukum Adat dan hukum Islam atau dua menara hukum (mimbar hukum).

John R. Bowen melihat bahwa masyarakat Gayo yang ada di Aceh mempraktikkan ketiga hukum itu secara bersamaan dengan basis pluralisme hukum, namun yang menarik dari tulisannya adalah negara harus berangkat dari wilayah regional Indonesia, kemudian diberlakukan dalam kancah Negara. Sehingga, Bowen lebih membahasakan sebagai pilar-pilar hukum yang di dalamnya terdapat hukum Adat, Islam, dan Negara.

Pluralisme Hukum Keluarga Pada Masa Kolonialisme

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, ada beberapa kebijakan hukum yang dikeluarkan untuk menyelesaikan permasalahan keperdataan, tidak terkecuali bagi hukum keluarga. Sebagai contoh, permasalahan warisan, berdasarkan pasal 131 jo. Ayat 161 *Indische Staatsregeling* pembagian warisan diatur berdasarkan pengelompokan-pengelompokan golongan. diantaranya: Pertama, orang-orang Belanda. Kedua, orang-orang Eropa yang lain. Ketiga, orang-orang Jepang, dan orang-orang lain yang tidak termasuk dalam kelompok yang pertama dan kedua, yang tunduk kepada hukum yang mempunyai asas-asas hukum keluarga yang sama. Keempat, orang-orang yang lahir di Indonesia (masyarakat pribumi) yang sah, ataupun diakui secara sah dan keturunan lebih lanjut dari orang-orang yang termasuk golongan kedua dan ketiga. Kemudian pada pasal 131 jo. Ayat 161 *Indische Staatsregeling* ditegaskan bahwa hukum waris yang diatur dalam KUHPerdata berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa itu. Lebih lanjut *Staatblad* No. 129 menegaskan bahwa hukum waris perdata berlaku bagi golongan Timur Asing dan Tionghoa.

Selain aturan di atas, ada beberapa aturan lain yang digunakan oleh Belanda dalam mengatur permasalahan kekeluargaan dan keperdataan, diantaranya adalah *Staatsblad* 1840 nomor 2 mengatur tentang pendaftaran kelahiran, perkawinan, dan kematian. *Molukse Huwelijken Reglement* yang diberlakukan kepada masyarakat Manado, Ternate, dan Ambon. Pada tahun 1937 diberlakukan S. 1933 No. 74 kepada masyarakat lingkup Jawa dan Madura setelah mengalami berbagai perubahan. Pada dasarnya semua *Reglement* ini mengatur tentang perkawinan masyarakat yang beragama Kristen, baik tentang syarat perkawinan, pendaftaran perkawinan, hingga perlangsungan perkawinan. Setelah berlakunya S. 1898 No. 158 mengenai perkawinan campuran, maka secara otomatis peraturan sebelumnya sudah tidak diberlakukan

lagi. Namun yang menarik dari semua ini, seperti yang ditulis oleh Soetojo, pada dasarnya semua peraturan di atas mengatur tentang hukum formilnya, namun sama sekali tidak mengatur tentang hukum materilnya, semua yang berbau materil semua dikembalikan kepada hukum adat masing-masing daerah.³⁴ Berdasarkan pasal 161 I.S. penduduk Hindia Belanda dibagi menjadi beberapa golongan, diantaranya: Penduduk Golongan Eropa, Penduduk Golongan Bumi Putra, dan terakhir adalah Kelompok Golongan Timur Asing.³⁵ Ini diperjelas lagi dengan beragamnya jenis pengadilan yang diadakan oleh pemerintahan Hindia Belanda, ada pengadilan khusus bagi masyarakat Eropa yang disebut sebagai European Courts, pengadilan Adat khusus masyarakat Pribumi yang disebut Native Courts, dan pengadilan Umum khusus masyarakat Campuran yang mengurus tentang administrasi keagamaan.³⁶ Pada penjelasan di atas, sangat terlihat begitu beragam hukum yang diberlakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda bagi masyarakat yang mendiami kepulauan Nusantara.

Pluralism Hukum Keluarga Pada Masa Kemerdekaan

Setelah bertahun-tahun masyarakat Indonesia membenahi sistem ketata negaraannya, bangsa Indonesia kemudian berhasil melakukan transformasi hukum keluarga dari sistem hukum bercorak civil law yang diwarisi oleh kolonialisme Belanda, menuju sistem kodifikasi dan unifikasi hukum³⁷ melalui mekanisme check and balances.³⁸ Sejak inilah kemudian muncul pekerjaan rumah terbesar Negara, yakni menciptakan undang-undang yang berpihak kepada masyarakatnya. Sehingga, Pada tahun 1974, Negara berhasil melegalkan Undang-Undang No. 1 (satu) tentang Perkawinan meskipun sedikit mengandung kepentingan beberapa kalangan. Setelah Undang-Undang perkawinan ini dilegalkan oleh Negara, ternyata ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak setuju dan belum siap untuk mengimplementasikan legal substantif dari Undang-Undang perkawinan itu. Implikasi dari ini, maka terjadilah rangkap hukum perkawinan yang dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia, diantaranya: Hukum Adat,³⁹ Hukum Islam,⁴⁰ dan Hukum Negara,⁴¹ meskipun beberapa kalangan berasumsi bahwa UUP No. 1 tahun 1974 merupakan hasil kodifikasi dan unifikasi mazhab-mazhab fikih di Indonesia, namun ini semua sangat sulit diterima oleh beberapa kalangan masyarakat Islam di Indonesia. Tindakan masyarakat ini kemudian yang memacu terjadinya pluralisme hukum gaya baru di Indonesia yang berbasis relatifisme kelompok dalam mempraktikkan hukum positif di Indonesia, dalam arti bahwa setiap kelompok masyarakat mempraktikkan perkawinan berdasarkan kepercayaan (Agama), kebudayaan (Adat), dan ketentuan Negara. Kelompok Agamawan mempraktikkan proses perkawinan berdasarkan ajaran atau hukum masing-masing agamanya, kelompok budayawan (Masyarakat Adat) mempraktikkan proses perkawinan itu berdasarkan ajaran dan hukum adatnya masing-masing, sedangkan kalangan Nasionalis dan masyarakat perkotaan melaksanakan perkawinan itu berdasarkan ketentuan dari Negara

Seiring dengan isu-isu globalisasi yang semakin deras, Negara pun secara dramatis menginginkan masyarakat Agamawan dan masyarakat Budayawan mematuhi undang-undang perkawinan itu. Berbagai upaya yang dilakukan Negara untuk menarik simpati masyarakatnya, diantaranya sosialisasi mengenai misi Negara untuk melindungi, mengayomi, dan mensejahterakan warga Negaranya. Namun sayangnya, berbagai upaya Negara di atas ternyata menimbulkan berbagai masalah di kalangan masyarakat agamawan dan budayawan. Bagi masyarakat agamawan dan budayawan yang masih berdomisili di berbagai plosok Indonesia, ketika akan menjalankan amanat Negara, ternyata terkendala dengan imprastruktur yang tidak memungkinkan mereka menjalani kehendak Negara, ditambah lagi dengan hegemoni,

panatismeme keagamaan/kebudayaan yang sangat tinggi, dan keterbatasan pengetahuan mengenai perundang-undangan, memicu peraturan yang dilegalkan oleh Negara belum siap untuk diimplementasikan atau diaplikasikan.

Apabila Negara terlalu memaksakan kehendaknya kepada hukum Adat yang tidak mendapatkan legalitas dari Negara, maka sudah dapat dipastikan bahwa hukum Adat tidak akan mampu bertahan lama, dan secara otomatis hukum adat akan tergusur oleh hukum Negara sebagai basis masyarakat modern. Salah satu sebab evolusi kebudayaan terjadi adalah dikarenakan oleh keragaman⁴² dan ketidak konsistenan suatu masyarakat dalam mempraktikkan budaya yang sudah ada, sehingga akan digantikan secara langsung oleh kebudayaan yang baru, maka akan terjadi apa yang disebut oleh para ahli sebagai evolusi kebudayaan atau mungkin perubahan kebudayaan (Culture Chance).⁴³ Jadi, apabila proses praktik perkawinan masyarakat suku Adat itu tidak konsisten dipraktikkan oleh penganutnya, maka dapat dipastikan bahwa budaya perkawinan masyarakat suku Adat otomatis akan digeser atau digantikan oleh prosedur-prosedur perkawinan yang sudah mendapatkan legitimasi penuh dari Negara.

Sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini dibuat, ada aturan yang sangat menarik mengenai perlindungan dan pemberlakuan hukum adat dalam perundang-undangan di Indoensia. Aturan ini misalnya dapat dilihat pada Undang-Undang No. 14 tahun 1970 (L.N. 1970. No. 74), peraturan ini mengatur tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Seiring dengan ini, Ihrom menjelaskan dalam tulisannya berjudul “Adat Perkawinan Toraja Sadan dan Tempatnya dalam Hukum Positif Masa Kini” mengatakan bahwa pasal 71 ayat 1 dalam penjelasannya (T.L.N. No. 295, tahun 1970) mengatakan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Undang undang ini sangat jelas menghendaki bahwa hukum Adat mendapatkan porsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, namun setelah disahkannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 hukum adat tidak mendapatkan porsi legalitas sedikit pun dalam peraturan perundang-undang Indonesia. Setelah UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 disahkan, ternyata hukum adat tidak mendapatkan porsi yang cukup dalam perundang-undangan, namun pluralism hukum di Indonesia semakin terasa ketika Negara menjadikan Agama salah satu unsur penting dalam sahnya suatu perkawinan masyarkat Indonesia. Sehingga, secara tidak sadar Negara telah mendorong terjadinya Pluralisme hukum di masyarakatnya, dalam masyarakat yang lebih mendominankan perkawinan agama lebih memberikan perhatian spesial terhadap pernikahan agama dari pada pernikahan yang bernuansa Negara.

Salah satu pasal yang memacu terjadinya pluralism hukum adalah pasal tentang pembagian harta bersama (permbagian harta setelah perceraian), pasal ini mengatur bahwa setiap pembagian harta bersama setelah perceraian dilakukan berdasarkan hukum masing-masing mempelai.

C.PENUTUP

Pluralisme hukum sebagai pendekatan atau kajian tidak lain adalah alat bantu bagi negara dalam proses pembentukan hukum dan pembangunan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat ke depannya. Pendekatan ini bukanlah pendekatan final yang nihil kelemahan dan kritik atau bukanlah solusi yang serta merta menyelesaikan segala permasalahan hukum yang ada pada masyarakat hingga lapis terbawah. Pluralisme hukum hadir untuk memberikan perspektif keberagaman sistem normatif pada Pemerintah, Legislatur baik di tingkat pusat

maupun daerah, dan aparat penegak hukum bahwa sudah saat nya membuang jauh-jauh cara ber hukum yang sentralistik dengan mengabaikan keragaman. Namun di sisi lain, kepastian hukum tetap menjadi prinsip penting yang perlu diperhatikan di tengah-tengah perspektif keberagaman sistem hukum tersebut. Inilah tantangan kajian pluralisme hukum saat ini dan di masa mendatang. Bagaimanapun, setiap tindakan melanggar hukum yang kita lakukan, akan mendapatkan balasannya. Maka sebagai warga Indonesia yang baik dan taat hukum, janganlah sesekali kita melakukan hal hal bodoh yang melanggar ketentuan hukum.

Pada akhirnya, keberhasilan pluralisme hukum dalam pembentukan hukum maupun pengembangan hukum memerlukan prasyarat, yaitu *political will* dari instansi terkait, seperti Pemerintah, DPR, DPRD, dan institusi peradilan (MA dan MK) untuk mengimplementasikan kajian pluralisme hukum dalam 'produk' lembaga mereka. Hal utama adalah bagaimana produk tersebut mengakomodasi pluralitas sistem normatif tanpa menghilangkan esensi kepastian hukum di dalamnya. Tulisan singkat ini hanya sebagai pembuka diskusi, oleh karenanya tidak hendak menjawab seluruh permasalahan yang ada.

Keberadaan hukum Adat, Agama, dan Negara merupakan realitas yang sangat penting dalam pendewasaan masyarakat Indonesia. Keterbukaan masyarakat Nusantara terhadap berbagai kebudayaan asing yang melakukan penyebaran kebudayaan tidak pernah dilawan oleh masyarakat Nusantara, ini menunjukkan begitu dewasanya nenek moyang bangsa Indonesia.

Perseteruan-perseteruan yang ada, pada dasarnya bukanlah dipicu oleh masyarakat pribumi, namun lebih disebabkan oleh kebudayaan-kebudayaan asing yang masuk di barisan kepulauan ini. Misalnya perseteruan antara hukum Adat dan hukum Islam, bukan disebabkan oleh keinginan masyarakat pribumi untuk melegalkan hukum adat yang ada, namun lebih disebabkan oleh keinginan pemerintahan Hindia Belanda untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat pribumi. Masyarakat pribumi tidak pernah menjastis bahwa hukum adat bertentangan dengan hukum Islam lebih khusus bagi masyarakat adat Indonesia yang memeluk agama Islam, namun mereka lebih bahagia mengatakan bahwa hukum adat adalah selalu sejalan dengan hukum Islam, ini bisa dilihat dari ungkapan beberapa masyarakat adat yang mengatakan bahwa hukum Islam sebagai petunjuk dan hukum Adat adalah sebagai pelaksana dari petunjuk hukum Islam itu. Demikian yang dapat disampaikan, tentu dalam tulisan yang sederhana ini terdapat banyak kekurangan, oleh karenanya mohon dimaklumi.

DAFTAR PUSTAKA

Gokma Toni Parlindungan S, *Asas Nebis In Idem Dalam Putusan Hakim Dalam Perkara Poligami Di Pengadilan Negeri Pasaman Sebagai Ceriminan Ius Constitutum*, Volume 2, Nomor 1, 2020.

Gokma Toni Parlindungan S, *Pengisian Jabatan Perangkat Nagari Pemekaran Di Pasaman Barat Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Ensiklopedia Of Journal, Vol 1 No 2 Edisi 2 Januari 2019,

Harniwati, *Peralihan Hak Ulayat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004*, Volume 1, Nomor 3, 2019.

Jasmir, *Pengembalian Status Hukum Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.

Jumrawarsi Jumrawarsi, Neviyarni Suhaili, *Peran Seorang Guru Dalam Menciptakan Lingkungan Belajar Yang Kondusif*, Ensiklopedia Education Review, Vol 2, No 3 (2020): Volume 2 No.3 Desember 2020

Mia Siratni, *Proses Perkawinan Menurut Hukum Adatdi Kepulauan Mentawai Di Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Ensiklopedia Of Journal, Vol 1 No 2 Edisi 2 Januari 2019,

Remincel, *Dimensi Hukum Pelanggaran Kecelakaan Lalu Dan Angkutan Jalan Lintas Di Indonesia*, Ensiklopedia Social Review, Volume 1, Nomor 2, 2019.

R Amin, B Nurdin, *Konflik Perwakafan Tanah Muhammadiyah di Nagari Singkarak Kabupaten Solok Indonesia 2015-2019*, Soumatera Law Review, Volume 3, Nomor 1, 2020.